

PENDIDIKAN BERKUALITAS (Upaya Menuju Perwujudan *Civil Society*)

*Muhandis Azzuhri**

Abstract: A qualified education can provide a right view about the process of changing views of society by setting up human resources that are righteous in God the Almighty, possessing virtuous noble character, having good personality, productive, physically and mentally healthy, independent, advanced, powerful, smart, knowledgeable, creative, skilled, disciplined, professional, responsible, socially minded, and be oriented to the future. In achieving this goal, education must be tailored to the needs of civil society that is humane, universal, democratic, in accordance with local and national cultures, capable of balancing between IMTAQ and IPTEQ as well as non-dichotomous accordingly be accommodative and applicative to all.

Kata kunci: pendidikan berkualitas, *civil society*, sumber daya manusia

Pendahuluan

Tugas pendidikan nasional bukan sekadar menghayati dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan lokal dan nasional, tetapi ikut membangun kebudayaan nasional tersebut. Pendidikan yang didasarkan pada kebudayaan menuntut pranata-pranata sosial untuk pendidikan seperti keluarga, sekolah, haruslah merupakan pusat-pusat penggalian dan pengembangan kebudayaan lokal dan nasional. Namun, yang terjadi dalam pendidikan kita tidak lagi berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan, yang ada hanyalah

* *Dosen Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*

diprioritaskan pada aspek intelektual, sedangkan aspek-aspek kebudayaan lainnya kurang terintegralistik.

Pendidikan bertujuan membentuk kepribadian seimbang di kalangan peserta didik melalui latihan rohani (spiritual), intelektual, emosional, dan jasmani dengan menunjukkan peserta didik itu kepada berbagai pengalaman pada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, kurikulum harus berdasarkan pada klasifikasi ilmu pengetahuan yakni ilmu-ilmu wahyu (Alquran) dan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui akal dari ayat-ayat *kauniyah* (alam jagat raya berserta seluruh isinya) (Nurdin, 2009: th.).

Sebab pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmaniah manusia oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Allah Yang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir.

Ahmad D. Marimba mengatakan dalam (Adzanwahiddie, 2009: th) bahwa, "Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap si terdidik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pendidikan tidak hanya untuk kepentingan individu atau pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990. Selain pendidikan dipusatkan untuk membina kepribadian manusia, pendidikan juga diperuntukkan guna pembinaan masyarakat (Adzanwahiddie, 2009: th).

Akar Historis *Civil Society*

Konsep *civil society* memiliki banyak versi dan interpretasi, kendatipun secara ideologis dapat digolongkan ke dalam dua versi ideologis, yakni versi kapitalisme dan sosialisme.

Gellner telah menelusuri akar gagasan *civil society* ini ke masa lampau dalam sejarah peradaban Barat (Eropa dan Amerika), antara lain yang didapatkannya adalah bahwa konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh pemikir terkenal Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816), dalam karya klasiknya *An Essay on History of Civil Society* (1767). Konsep *civil society* lebih

lanjut dikembangkan oleh kalangan pemikir berikutnya seperti Rousseau, Hegel, Marx dan Tocqueville. Studi Gellner berlanjut sampai pada kajian terhadap upaya menghidupkan kembali konsep *civil society* di Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer.

John Locke, menurut Fahmi Huwaidi (1996) merupakan orang pertama kali yang membicarakan pemerintahan sipil (*civillian government*), sebagai cikal bakal konsep *civil society*. Konsep ini ditulisnya dalam buku yang berjudul *Civillian Government* pada tahun 1690 M. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan. Dalam misi pembentukan pemerintahan sipil itu, Locke membangun pemikiran otoritas rakyat untuk merealisasikan kebebasan dari kekuasaan elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan. Menurutnya, semua dapat terwujud melalui demokrasi parlementer yang berfungsi sebagai wakil rakyat dan pengganti otoritas raja.

Sedangkan Rousseau yang terkenal dengan bukunya *The Social Contract* (1762 M), berbicara tentang otoritas rakyat, dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara individu rakyat dengan penguasa. Dalam hal ini dia satu tujuan dengan Locke, yaitu mengajak individu rakyat untuk ikut menentukan masa depannya sendiri, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingannya sendiri.

Karl Marx (1818-1883 M) dan pendahulunya Hegel, sebagai pencetus ide sosialisme, juga mempunyai konsep pemberdayaan rakyat ini. Marx dan Hegel berpendapat bahwa negara adalah bagian dari suprastruktur, yang mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan. Negara tidak mewujudkan kehendak universal tapi kepentingan kelas borjuis. Secara lebih lengkap Marx telah memberikan teori tradisional tentang dua kelompok masyarakat di dalam negara yang dikenal dengan *base-superstructure*. Teori kelas sebagai salah satu pendekatan dalam Marxisme tradisional menempatkan perjuangan kelas sebagai hal sentral, faktor esensial, dan menentukan dalam perubahan sosial. Pendekatan ini cenderung melihat masyarakat kapitalis dari perspektif ekonomi. Masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu proletar dan borjuis. Dari perspektif ini, masyarakat terdiri dari dua unsur esensial yaitu dasar (*base*) dan superstruktur. Adanya dua kelas ini mau tidak mau akan membawa kepada konflik yang tidak dapat dihindarkan ketika keduanya berusaha mendominasi yang lainnya.

Selain Marx, Antonio Gramsci salah satu tokoh *Neo-Marxisme* telah mengembangkan teori ini menjadi lebih luas. *Base-superstructure* dalam teori Marx dikembangkan tidak hanya dalam bidang ekonomi. Tetapi bisa juga dalam bidang pendidikan, politik, dan sebagainya. Dalam bidang politik, negara menjadi *superstructure* yang sering memaksakan kehendak kepada rakyat (*base*). Adanya pembagian kelas ini, menurut Gramsci menuntut untuk terciptanya kemandirian masyarakat (*civil society*), agar negara lebih terbatas dalam melebarkan kekuasaannya.

Sementara itu, Bell (1989), Keane (1989), dan Cohen & Arato (1992), menyatakan bahwa *civil society* setidaknya memiliki tiga ciri utama; *Pertama*, kemandirian yang tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat, ketika berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan, *ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

Kembali kepada Gellner, menurutnya, *civil society* dalam arti luas di samping merupakan sekelompok institusi/lembaga dan asosiasi yang cukup kuat mencegah tirani politik baik oleh negara maupun komunal/komunitas, juga cirinya yang menonjol adalah adanya kebebasan individu di dalamnya, di mana sebagai sebuah asosiasi dan institusi, ia dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas.

Lebih lanjut Gellner menyatakan bahwa *civil society* tidak hanya menolak dominasi negara atas dirinya, tetapi juga karena sebagai institusi yang bersifat *non-state*. Maka dalam penampilan kelembagaannya ia tidak mendominasi individu-individu dalam dirinya. Di sinilah posisi individu sebagai aktor sosial yang bebas yang diistilahkan Gellner sebagai manusia moduler (tidak dipengaruhi kultur), yang menurutnya tidak merupakan prasyarat bagi perwujudan *civil society*. Jadi *civil society* tidak hanya menerapkan sifat otonominya terhadap negara, namun dalam konteks internalnya dari sejak hubungan antar anggotanya, ia juga merupakan institusi yang menghargai keniscayaan perlunya menghargai otonomi individual.

Sejalan dengan itu, Culla menyatakan bahwa variabel utama *civil society* adalah otonomi (kemandirian), publik dan *civic*, sesuatu yang meniscayakan demokrasi bagi masyarakat seperti kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat serta kesempatan sama dalam mempertahankan kepentingan di depan umum (Fikri, 2009: th).

Dari berbagai versi tentang konsep *civil society* tersebut, Asrori S. Karni dalam Ahmad Baso (1999) menyimpulkan ada 5 (lima) teori *civil society* yang ada di Barat :

Pertama, teori Hobbes dan Locke, yang menempatkan *civil society* sebagai penyelesaian dan peredam konflik dalam masyarakat. Jadi, *civil society* disamakan dengan negara.

Kedua, teori Adam Ferguson, yang melihat *civil society* sebagai gagasan alternatif untuk memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualisme, berupa benturan ambisi dan kepentingan pribadi. *Civil society* dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa rasa solider dan kasih sayang antar sesama.

Ketiga, teori Thomas Paine, yang menempatkan *civil society* sebagai antitesis negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk belaka (*necessary evil*).

Keempat, teori Hegel dan Marx, yang tidak menaruh harapan berarti terhadap entitas *civil society*. Konseptualisasi mereka tentang *civil society* bukan untuk memberdayakannya atau menobatkannya, tetapi lebih untuk mengabaikan dan bahkan melenyapkannya.

Kelima, teori Tocquville, yang menempatkan *civil society* sebagai entitas untuk mengimbangi (*balancing force*) kekuatan negara, meng-counter hegemoni negara dan menahan intervensi berlebihan negara (Fikri, 2009: th).

Istilah *civil society* di Indonesia pertama kali muncul dari kalangan sarjana Australia, tepatnya Monash University, melalui sebuah konferensi yang diselenggarakan dengan tema “*State and Civil society in Contemporary Indonesia*”, 25-27 Nopember 1988. Pelaksanaan konferensi tersebut melibatkan sarjana Indonesia, Arif Budiman, yang saat itu diundang sebagai *George Hick Visiting Fellow* pada *Centre of Southeast Asian Studies, Monash University*. Konferensi itu pula yang kemudian melahirkan sebuah buku yang disunting oleh Arif Budiman dengan judul *State and Civil society in Indonesia* (Prasetyo dan Munhanif, 2002: 78-79). Sejak itulah istilah *civil society* berkembang di Indonesia.

Lebih dari itu, dalam perkembangannya kemudian, dunia intelektual Indonesia terlibat secara intensif dalam upaya perumusan tentang *civil society*. Hal ini dapat terlihat dengan berkembangnya satu terjemahan yang kemudian digunakan secara luas untuk istilah *civil society*, yakni “masyarakat madani”.

Istilah yang awalnya diperkenalkan oleh mantan Deputy Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang kemudian dipopulerkan oleh Nurcholis Majid (Prasetyo dan Munhanif, 2002: 81).

Civil society merupakan masyarakat yang memiliki derajat budaya tertentu, kuncinya masyarakat tidak hanya diwarnai oleh pemerintah atau penguasa, tetapi oleh berbagai kekuatan masyarakat yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam *civil society* masyarakat mengambil bagian sepenuhnya dalam mewarnai masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak hanya ditentukan oleh penguasa, tetapi organisasi masyarakat termasuk partai seharusnya memiliki peran penting untuk mewarnai masyarakat. Semakin banyak organisasi masyarakat semakin baik, akan tetapi organisasi masyarakat itu harus mampu mengangkat dirinya menjadi bagian yang penting dalam struktur masyarakat umumnya (Djohar, 2003: 168-169).

Konstruk Sistematis *Civil Society*

Perubahan masyarakat harus dipahami secara sistemik dengan mengkaji secara tajam perubahan aspek-aspek struktural, kultural, dan proses-proses sosialnya. Perubahan struktural paling terasa adalah perubahan yang terjadi atas tatanan kekuasaan, misalnya perubahan dari pola masyarakat kolonial menjadi neokolonial, dari feodal ke neofeodal, dari otoriter menuju masyarakat demokratis. Perubahan kultural adalah perubahan keyakinan kolektif masyarakat mengenai segala sesuatu yang dipandang baik dan benar beserta produk-produk budaya yang menyertainya. Perubahan kultural membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan perubahan struktural. Perubahan sosial dapat terjadi semata-mata karena kondisi struktural dan kultural dan dapat pula terjadi karena pengaruh yang datang dari faktor-faktor eksternal.

Menurut Kuntowijoyo ada tiga tahapan perubahan masyarakat. *Pertama*, tahap masyarakat ganda, yakni terpaksa ada pemilahan antara masyarakat madani (*civil society*) dengan masyarakat politik (*political society*) atau antara masyarakat dengan negara. Karena adanya pemilahan ini, maka dapat terjadi negara tidak memberikan layanan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. *Kedua*, tahap masyarakat tunggal, yaitu ketika masyarakat madani (*civil society*) sudah berhasil dibangun. *Ketiga*, tahap masyarakat etis (*ethical society*) yang merupakan tahap akhir dari perkembangan tersebut (Kuntowijoyo, 1997: 22). Pendapat Kuntowijoyo ini dipengaruhi oleh teori Gramsci yang memang dengan sengaja dipakai sebagai

titik masuk teori politik Islam ke teori politik modern. Menurut teori ini, negara adalah struktur, sedangkan masyarakat adalah suprastruktur. Kalau masyarakat terbentuk karena kesadaran, negara terbentuk karena kepentingan.

Dalam kaitannya dengan perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya, Kuntowijoyo dalam (Jalal dan Supriadi, 2001: 43) mengemukakan tiga strategi. *Pertama*, strategi struktural untuk mengubah tahap keterpilahan negara dan masyarakat menuju ke suatu tahap menyatunya masyarakat dan negara. “Masyarakat politik” tidak dengan sendirinya menjadi satu dengan “*civil society*”, tanpa terjadinya perubahan struktural dalam bentuk, misalnya, pembentukan Majelis Permusyawaratan yang lebih representatif, pemilahan kedudukan eksekutif dari yudikatif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Kedua, strategi kultural lebih menekankan terjadinya perubahan perilaku individual dan cara berpikir. Hal ini berbeda dengan perubahan struktural yang lebih menekankan perubahan perilaku kolektif dan struktur politik.

Ketiga, strategi mobilitas sosial bersifat lebih alami, sesuai dengan perkembangan intelektualitas dan hati nurani manusia dan masyarakatnya; dan hal ini sangat cocok untuk menciptakan masyarakat etis.

Paradigma Pendidikan *Civil Society*

Frietz R Tambunan dalam (Susilo, 2007: 224-225) menjelaskan bahwa kata pendidikan berasal dari kata Latin *educare* yang secara harfiah berarti “menarik ke luar dari” sehingga pendidikan adalah sebuah aksi membawa peserta didik keluar dari kondisi tidak merdeka, tidak dewasa, dan tergantung, ke suatu situasi merdeka, dewasa, dapat menentukan diri sendiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan yang demokratis tidak bertujuan menciptakan manusia siap kerja, tetapi membentuk manusia matang dan berwatak yang siap belajar terus, siap menciptakan lapangan kerja (*job creator*), dan siap mengadakan transformasi sosial karena sudah lebih dahulu mengalami transformasi diri lewat pendidikan. Maka pendidikan adalah sebuah proses pedagogis di mana seorang peserta didik dibebaskan dari ketidakmatangan dan kebodohan menjadi seorang manusia matang, intelek, dan kultural.

Hakikat pendidikan yang demokratis adalah pemerdekaan. Tujuan pendidikan dalam suatu negara yang demokratis adalah membebaskan anak

bangsa dari kebodohan, kemiskinan dan berbagai “perbudakan” lainnya. Bagi negara, pendidikan adalah salah satu tugas yang terpenting, karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang istimewa. Pendidikan merupakan hak pribadi manusia yang berakar dalam aneka kebutuhan pokok manusia sebab manusia tidak bisa mengembangkan hidupnya tanpa pendidikan minimum dan bermutu. Tanpa pendidikan, manusia akan tetap kerdil, tergilas kekuatan dan kekuasaan alam, terpenjara pesona magis-misteri, dan seperti kata Asimov, tingkat kesadarannya hanya sebatas ide *curiosity* (instink) binatang dan takkan berubah menjadi *creative curiosity*, ciri orang terdidik. Dengan demikian, hak pendidikan bukan saja sekedar kebutuhan pokok fisik, tetapi juga kebutuhan pokok yang khas manusiawi yang akhirnya didasarkan atas martabat manusia yang tidak bisa ditawar (Susilo, 2007: 225-226).

Agar mewujudkan pendidikan yang *civil society* perlu ada paradigma baru pendidikan yang akan membawa angin perubahan mendasar dalam dunia pendidikan, sebagaimana ditawarkan oleh Waras Kamdi dalam (Susilo, 2007: 227-229), yaitu:

Pertama, perubahan visi kurikulum, dari visi kurikulum efisiensi sosial ke kurikulum yang fleksibel dan egaliter, atau dari kurikulum yang berwatak industrial-kapitalistik ke demokratis. Kurikulum efisiensi sosial yang berakar pada tradisi pendidikan kita dikembangkan atas dasar kebutuhan spesifik masyarakat (ekonomik-industrial).

Kedua, perubahan pada ranah pembelajaran. Praktik pembelajaran yang kini didominasi teori belajar asosiasi dan behavioristik akan digeser teori belajar kognitif dan konstruktivistik. Pembelajaran akan berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual yang berlangsung secara sosial dan kultural, mendorong siswa membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri dalam konteks sosial, dan belajar dimulai dari pengetahuan awal dan perspektif budaya. Tugas belajar didesain menantang dan menarik untuk mencapai derajat berpikir tingkat tinggi, dalam hal ini proses dipandang sama penting dengan hasil belajar, dan berpikir cerdas dikonsepsikan mencakup “metakognisi” atau kemampuan memonitor belajar dan berpikir sendiri. Pembelajaran bukan hanya mengandung informasi tetapi juga proses membangun watak dan identitas personal.

Ketiga, perubahan strategi dan fungsi penilaian. Pengukuran yang eksak dan berstandar presisi dengan teknik tes (objektif) terstandar dan isomorfis serta perannya sebagai alat untuk “menghakimi” siswa mengakar kuat pada

tradisi pendidikan kita kini. Penilaian terintegrasi dengan pembelajaran untuk mendukung proses belajar, dan siswa aktif mengevaluasi belajarnya sendiri.

Pemberdayaan Kualitas Pendidikan Berbasis *Civil Society*

Membangun *civil society* melalui pendidikan termasuk pemberdayaan kualitas pendidikan yang dibedakan menjadi (1) pemberdayaan manusianya yaitu siswa, dan (2) pemberdayaan proses pendidikannya, meliputi peningkatan peranan guru dan pembelajarannya. Pemberdayaan siswa pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penampilan siswa sesuai dengan karakteristik perilaku anak pada usianya dan aktivitas pembelajarannya dengan menghindarkan mereka dari kebiasaan tergantung dan kebiasaan disuap, akan tetapi lebih diarahkan kepada kebiasaan mandiri, berinisiatif, produktif, berencana, tuntas, kreatif, sabar, jujur, terbuka atau transparan, dengan transaksi horizontal secara proporsional. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi faktor pendukung dalam tatanan *civil society* (Djohar MS, 2003: 179).

Adapun mutu atau kualitas itu sendiri adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat karena mutu pendidikan yang diinginkan tidak akan terjadi begitu saja. Mutu yang diinginkan tersebut harus direncanakan. Mutu perlu menjadi bagian penting dalam strategi sebuah institusi dan untuk meraihnya wajib menggunakan pendekatan yang sistematis dengan menggunakan proses perencanaan yang matang. Perencanaan strategi merupakan salah satu bagian dalam upaya peningkatan mutu (Rohiat, 2008: 52).

Menurut Sallis dalam (Nurkolis, 2003: 67) kualitas memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif. Dalam konsep absolut sesuatu barang disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Dalam konsep ini kualitas mirip dengan suatu kebaikan, kecantikan, kepercayaan yang ideal tanpa ada kompromi. Kualitas dalam makna absolut adalah yang terbaik, tercantik, terpercaya. Bila dipraktikan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya.

Sallis menegaskan, “*Quality does not just happen, it must be planned for. Quality need to be approach systematically using a rigorous strategic planning process. Strategic planning is one of the major planks to Total Quality Management. Without clear long-term direction the institution cannot plan fo quality improve*” (Sallis, 1993: 107).

Pemberdayaan Kualitas Pendidikan berbasis *civil society* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Merubah Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran sekarang ini lebih berorientasi pada hubungan vertikal, menggunakan sistem penyampaian (*delivery system*), sehingga siswa lebih tersosialisasi kepada transaksi vertikal daripada horizontal. Proses pembelajaran horizontal terjadi apabila kedudukan guru, siswa sama-sama belajar, dan sama-sama menjadi sumber informasi, yang bersama-sama menghadapi persoalan belajarnya. Proses pembelajaran dalam *civil society* harus menghindari terjadinya mekanisme (1) *preskriptif* (mekanisme pemberian perintah) dan (2) transfer pengetahuan, tetapi digeser ke arah dialogik dan transformational, yang menurut Paulo Freire sebagai perwujudan dari pendidikan yang membebaskan, sehingga siswa akan merasakan manfaatnya belajar (Djohar, 2003: 180-181)

Pendidikan di Indonesia lebih sering terjebak dan berhenti pada filsafat atau paradigma bahkan kurikulumnya tetapi tidak mempersoalkan praksis pendidikannya, yakni bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembelajaran itu terjadi. Di negara kita, yang menganut “*delivery system*” dalam pembelajaran, mementingkan transfer pengetahuan dan membuat pendidikan terbelunggu. Akibatnya, guru yang baik diukur dari mutu kemampuan ceramah untuk menyampaikan pengetahuan itu. Pembelengguan juga terjadi akibat proses pembelajaran hanya diorientasikan pada ranking dan nilai UAN dan inilah yang tertulis dalam terbitan UNESCO dinamakan dengan “*Teaching to the Test*” yang hanya menghasilkan budaya hafalan (Anonim, tt: th).

Model pembelajaran seperti ini tidak akan mampu menyiapkan generasi bangsa untuk menghayati dan melaksanakan tatanan hidup dalam *civil society*. Seharusnya kreativitas yang menjadi dasar kemampuan anggota *civil society*, agar masyarakat mampu melaksanakan partisipasi integratif (Djohar, 2003: 181).

2. Mengembalikan Citra Sekolah dan Pendidikan

Dalam pendidikan modern memang benar telah terjadi pergeseran konsep pendidikan dari pendidikan di rumah ke arah pendidikan di sekolah dengan memperankan kurikulum dan guru yang profesional. Akan tetapi peran itu sekarang menjadi rancu, karena adanya pembelengguan (1) sentralisasi, (2) uniformitas, dan (3) memburu standar nilai UAN. Akibatnya kurikulum diturunkan dari atas, dan guru menjadi alat penguasa sekedar melaksanakan tugas sesuai dengan juklak dan juknis untuk keperluan penguasa tadi, dan bukan untuk keperluan siswa. Akibatnya siswa, diperlakukan untuk kepentingan kurikulum dan bukan kurikulum untuk kepentingan siswa. Akhirnya anak kehilangan hak-haknya. Nasib peserta didik lebih parah lagi akibat korban rangking dan nilai UAN.

Sekolah akhirnya bergeser makna, tidak lagi menjadi tempat belajar, akan tetapi sebagai “panggung pentas” untuk memperoleh “juara”. Akibat dari perubahan konsep pendidikan ini, peserta didik tidak memperoleh apa-apa kecuali pengetahuan hafalan yang semu, dan apabila hafalannya hilang, maka akhirnya mereka tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki budaya individu belajar jangan diharapkan dapat mendukung terwujudnya *civil society*.

3. Memperdayakan *Civil Society*

Meskipun adanya tatanan *civil society* atau masyarakat madani selalu diharapkan, akan tetapi dalam prosesnya kita tidak akan terhindar dari tarikan tatanan masyarakat yang lebih global, atau tarikan sentrifugal yang lain. Tatanan kehidupan global akan mewarnai budaya pendidikan kita yang (1) lebih teknologik, (2) mendorong kualitas kepuasan kita yang juga lebih ke kepuasan teknologi, dan (3) tidak dapat dihindari lebih kompleksnya konflik masyarakat. Pendidikan damai mengharapakan pemberdayaan masyarakat agar mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan cara kreatif, dan menghindarkan diri dari cara kekerasan. Membiasakan siswa melalui belajar individual dalam kelompok dapat memberdayakan mereka terbiasa hidup dalam konflik dan terlatih untuk memecahkan konflik itu sendiri secara mandiri (Djohar, 2003: 182-184).

Simpulan

Pendidikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan bangsa hendaknya dibangun atas paradigma pendidikan yang memiliki empat pilar, diantaranya:

Pertama, pendidikan untuk semua warga masyarakat. Cita-cita era reformasi sekarang ini tidak lain adalah membangun suatu *civil society* Indonesia. Oleh karena itu, paradigma baru pendidikan nasional diarahkan kepada terbentuknya *civil society* Indonesia tersebut. Pendidikan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pendidikan berperan dalam membangun *civil society* dan tumbuh atas kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidupnya. Pendidikan harus berlangsung dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk semua masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat bukan merupakan objek pendidikan dari negara atau sekelompok penguasa, tetapi partisipatif aktif dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Pendidikan bersama-sama masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan di dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, pendidikan demokratis. Pendidikan yang dapat mengembangkan *civil society* adalah proses pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Pendidikan demokratis merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokratis yakni pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya.

Ketiga, pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal. Bangsa Indonesia saat ini terancam disintegrasi bangsa. Hal ini sebagai akibat dari sistem pendidikan yang bersifat sentralistik yang telah lama diterapkan. Pendidikan sentralistik kurang mengakomodasi adanya kebudayaan kebhinekaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan kebudayaan merupakan khazanah dalam mengembangkan sistem pendidikan. Unsur-unsur budaya

lokal yang tersebar di bumi Indonesia ini dikaji dan dikembangkan sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi terwujudnya kebudayaan nasional.

Keempat, pendidikan yang seimbang antara imtaq dan iptek. Pendidikan harus dikonsepsikan sebagai aktualisasi sifat-sifat Allah pada manusia dan disusun sebagai suatu proses sepanjang hayat dan harus meliputi pengalaman-pengalaman yang berguna dari berbagai sumber baik itu pengetahuan, keterampilan atau sikap, di dalam dan di luar sekolah yang akan menjadikan peserta didik dapat memikul tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah, dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungannya.

Maka untuk mewujudkan pendidikan *civil society* ini perlu dilakukan tekad dari *stakeholder* pendidikan itu sendiri yang terdiri dari unsur struktural meliputi Ditjen Dikti, Badan Akreditasi Nasional, Dewan Pendidikan Tinggi, Guru/Dosen, Pengelola Pendidikan, dan Masyarakat serta unsur kultural meliputi kurikulum pendidikan, Strategi Pengajaran, budaya lokal yang selaras dengan asas kebersamaan, berkesinambungan dan memanusiakan manusia dalam proses pengajaran, tidak memakai sistem *top down* tetapi memakai sistem *bottom up*. Dengan demikian, sistem pendidikan *civil society* akan memiliki pengetahuan umum dan iman yang mantap melalui strategi mobilitas sosial yang dapat menghasilkan perubahan menuju *civil society* secara lebih sadar dan tepat guna.

Daftar Pustaka

- Adzanhiddie. 2009. Hubungan Manusia dan Pendidikan, dalam <http://www.azizmuslim.eg.vg/exist/index.php/lsm/kegiatan-mereka/174-referensi-makalah.html?showall=1>, diakses pada tanggal 11 Mei 2009.
- Anonim. tt. *Education in Asia and The Pasific*, Bangkok: UNESCO.
- Fikri, Abu. 2009. Konsep civil society dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis dalam <http://www.angelfire.com/md/alihsas/madania.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2009.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan.

- MS, Djohar. 2003. *Pendidikan Strategik: Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: LESFI.
- Nurdin, Diding. 2009. Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, dalam <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/pendidikan/367-reformasi-pendidikan-menuju-masyarakat-madani.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2009.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Prasetyo, Hendro, dan Ali Munhanif. 2002. *Islam dan Civil society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama.
- Sallis, Edward. 1993. *Total Quality Management in Education*, Philadelphia: Diddles Ltd, Guilford, and King's Lynn.
- Susilo, M. Joko. 2007, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.